

Analisis Konteks: Perubahan Perilaku Masyarakat Pasca Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Nurkhasanah, Rutiana Dwi Wahyunengseh

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret

email: ananurkhasanah@student.uns.ac.id

Abstrak

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah upaya strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Salah satu tujuan program adalah menyediakan infrastruktur permukiman. Namun sebanyak apapun infrastruktur yang terbangun akan menjadi sia-sia jika tidak ada kesadaran masyarakat untuk merawat, memelihara, dan mengubah perilaku hidupnya ke arah bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai aspek keberlanjutan kebijakan Program KOTAKU dengan studi perubahan perilaku. Penelitian ini berfokus pada konteks lingkungan yang berkontribusi pada perubahan atau ketiadaan perubahan perilaku dan jenis perubahan perilaku masyarakat pasca implementasi Program KOTAKU di Desa Pucungrejo dan Desa Sokorini Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Selanjutnya data wawancara juga dianalisis menggunakan aplikasi *Nvivo 12 Plus*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) intervensi dari faktor eksternal sangat berkontribusi pada perubahan perilaku masyarakat; (2) perubahan perilaku masyarakat berlangsung pada tataran kognitif, afektif, dan bentuk perilaku; (3) hambatan perubahan perilaku adalah karakteristik individu masyarakat itu sendiri terhadap lingkungannya.

Kata Kunci: analisis konteks; perubahan perilaku; perilaku hidup bersih dan sehat, kota tanpa kumuh

Abstract

City Without Slums Program (KOTAKU) is a strategic effort of the Ministry of Public Works and Public Housing to accelerate the handling of slum settlements in Indonesia. One of the program's objectives is to provide housing infrastructure. However, no matter how much infrastructure is built, it will be in vain if there is no public awareness to care for, maintain, and change their behavior towards a clean and healthy life. This study aims to analyze the sustainability aspects of KOTAKU Program policy by studying behavior change. This study focuses on the environmental context that contributes to the change or absence of behavior change and the type of changes in community behavior after the implementation of the KOTAKU Program in Pucungrejo Village and Sokorini Village, Muntilan District, Magelang Regency. The research method used is a qualitative research method with data collection through documentation, observation, and in depth interviews. Selection of informants using purposive sampling technique. Data were analyze using interative analysis by Miles and Huberman. Furthermore, interview data were also analyzed using the Nvivo 12 Plus application. The results showed that: (1) intervention from external factors greatly contributed to change in people's behavior; (2) changes in people's behavior take place at the cognitive, affective, and behavioral levels; (3) the barriers to behavior change are individual characteristics of the community itself to its environment.

Keywords: context analysis; behavior change; clean and healthy lifestyle; city without slums

Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan oleh administrator publik untuk mengintervensi persepsi hingga perubahan perilaku masyarakat. Intervensi perubahan perilaku merupakan serangkaian aktivitas yang terkoordinasi dan dirancang untuk mengubah pola perilaku yang telah ditentukan sebelumnya (Michie et al, 2011). Pendekatan perilaku membantu pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan kebijakan seperti kejahatan dan kelestarian lingkungan (Institute for Government, 2010). Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengakibatkan semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan tempat tinggal penduduk (Nurkhasanah, 2019). Kepadatan penduduk di suatu wilayah itulah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendeskripsikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni, dapat dikarenakan oleh ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Di Indonesia, luasan permukiman kumuh perkotaan tercatat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No 40 Tahun 2016 sejumlah 35.291 hektar yang tersebar di 34 provinsi, 271 kabupaten/kota dan di 11.067 kelurahan/desa. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 secara jelas telah mengamanatkan

pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu meningkatkan kualitas kawasan kumuh, mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru, serta penghidupan yang berkelanjutan. Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU menjadi upaya strategis guna percepatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh menjadi 0 (nol) hektar di Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan luas wilayah permukiman kumuh terluas diantara provinsi lainnya yakni seluas 3.927 Ha. Kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah tersebar di 35 kota/kabupaten, salah satunya Kabupaten Magelang yang tercatat masih mengantongi lokasi kawasan kumuh seluas 85,09 hektar. Kabupaten Magelang juga merupakan salah satu kawasan strategis nasional khususnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Candi Borobudur. Keputusan Bupati Magelang No 188.45/498/KEP/25/2014 menunjukkan bahwa lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Magelang tersebar di 9 (sembilan) kawasan di kelurahan/desa, Kawasan permukiman kumuh tersebut berada di 4 kecamatan, dimana kawasan permukiman kumuh paling banyak terletak di Kecamatan Muntilan. Desa di kecamatan tersebut yang mempunyai kawasan kumuh terluas adalah Desa Pucungrejo dan yang terkecil kedua adalah Desa Sokorini.

Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, penanganan kawasan permukiman kumuh juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang cenderung bersentuhan langsung dengan akar penyebab munculnya kawasan permukiman kumuh harus terlibat dalam menangani permasalahan kumuh ini (Madiasworo, 2017; Sahroni, 2019). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lars Tummers (2019) menyoroti bagaimana pemerintah dapat mencoba mengubah perilaku warga dan memaparkan kerangka kerja konseptual yang membantu menganalisis apakah kebijakan publik untuk merangsang perubahan perilaku efektif dan didukung oleh pemangku kebijakan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Tunis et al (2010) membandingkan berbagai intervensi dan strategi untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati, dan memantau kondisi kesehatan pasien. Penelitian ini akan mereplikasi sifat intervensi yang terlibat (apakah melibatkan masyarakat) dan konsekuensi (akibat dari Program KOTAKU).

Penelitian dari Sahroni (2019) menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku positif, perkembangan kemampuan dalam memecahkan masalah, memaknai informasi, serta berpikir reflektif dan evaluatif pada masyarakat dari implementasi Program KOTAKU. Hal itu berkontribusi memperkuat asumsi penelitian ini bahwa Program KOTAKU dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Menurut

Setya Heti, Asisten Koordinator Mandiri Program KOTAKU Kota Kabupaten Magelang, kesadaran masyarakat dalam merawat, memelihara, dan mengubah pola hidup bersih dan sehat akan mempengaruhi keberlanjutan program. Karena sebanyak apapun infrastruktur permukiman yang terbangun akan menjadi sia-sia jika keberlanjutan program berbasis masyarakat tidak diiringi perubahan perilaku dan pola hidup dan sehat masyarakat (beritamagelang.id, 2019). Penjelasan asisten koordinator mandiri program lapangan tersebut menunjukkan adanya gap antara normatif tujuan program dengan kenyataan di arena kelompok sasaran penerima program.

Mazmanian dan Sabatier (1983) menyebut bahwa tindakan mengidentifikasi gap antara harapan dan kenyataan dalam implementasi program kebijakan publik termasuk dalam tindakan evaluasi. Dalam kasus tersebut, gap yang muncul adalah perbedaan perubahan perilaku yang diharapkan. Dalam kajian evaluasi kebijakan publik, upaya mengevaluasi perubahan perilaku disebut sebagai studi *behavior change* (Tummers, 2019; Michie et al, 2011). Perubahan perilaku kelompok sasaran dipengaruhi oleh beberapa komponen lingkungan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dimana kelompok sasaran kebijakan diterapkan disebut konteks kebijakan (Mazmanian & Sabatier, 1983; Grindle, 1980). Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada pada intervensi yang berkontribusi terhadap perubahan atau ketiadaan perubahan perilaku masyarakat dan sejauh mana perubahan perilaku masyarakat setelah implementasi Program KOTAKU di Desa Puncungrejo dan Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang

Michie & Robert West (2013) membagi intervensi menjadi 9 (sembilan) intervensi atau kebijakan dalam *Behaviour Change Wheel* (BCW). Penelitian ini kemudian akan memetakan hasil intervensi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam program menjadi konteks lingkungan dari faktor internal dan eksternal individu yang berkontribusi pada perubahan atau ketiadaan perubahan perilaku masyarakat pasca implementasi Program KOTAKU. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisa dan membandingkan bagaimana perubahan perilaku masyarakat pasca implementasi Program KOTAKU di antara dua desa yang menjadi lokasi penelitian. Jenis perubahan perilaku akan dikategorikan menjadi 3 (tiga) meliputi: 1) Perubahan dalam tataran kognitif, yaitu perubahan cara berpikir, kelompok sasaran tahu apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tidak kumuh pasca intervensi Program KOTAKU; 2) Perubahan dalam tataran afektif, yaitu perubahan kesediaan atau kesetujuan pada nilai keberlanjutan lingkungan sehat sebagai pencegahan kumuh pasca intervensi Program KOTAKU; 3) Perubahan dalam bentuk perilaku, yaitu perubahan yang ditunjukkan dengan aksi atau tindakan yang mencerminkan pola hidup bersih dan sehat dan memelihara lingkungan agar tidak kembali kumuh pasca intervensi Program KOTAKU.

Kerangka pikir merujuk pada kajian pustaka yang mendeskripsikan intervensi dan dukungan lingkungan yang berkontribusi pada perubahan atau ketiadaan perubahan perilaku masyarakat yang dikategorikan menjadi faktor internal individu dan faktor eksternal individu. Selanjutnya jenis perubahan perilaku masyarakat pasca implementasi Program KOTAKU dikategorikan menjadi: 1) Perubahan dalam tataran kognitif; 2) Perubahan dalam tataran afektif; dan 3) Perubahan dalam bentuk perilaku.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *context analysis*. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu peneliti sudah mengetahui kepada siapa akan melakukan wawancara yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Subyek informan penelitian ini adalah DPRKP, DPUPR, Koordinator Program KOTAKU, Fasilitator USAID IUWASH PLUS Kabupaten Magelang, Kepala Desa Pucungrejo dan Desa Sokorini, KSM dan KPP Desa Pucungrejo dan Desa Sokorini, serta masyarakat Desa Pucungrejo dan Desa Sokorini. Sementara itu, validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Data wawancara kemudian dianalisis menggunakan aplikasi *Nvivo 12 Plus*. Selanjutnya teknik analisis data ini juga menggunakan teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman dengan 4 tahapan yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Capaian pengurangan kumuh melalui Program KOTAKU di Kabupaten Magelang telah mencapai 61.56 hektar. Pengentasan kumuh tersebut dilaksanakan melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, sumur bor untuk penanganan air, dan sebagainya. Kemudian terkait pengadaan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah seperti pengadaan motor sampah, TPS3R, dan TPST, serta APAR untuk proteksi kebakaran. Namun sebanyak apapun infrastruktur yang dibangun, akan tidak ada artinya jika tidak ada upaya perawatan, pemeliharaan, serta perubahan perilaku dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Gambaran hasil temuan dari pengumpulan data melalui teknik wawancara mendalam diolah menggunakan aplikasi *Nvivo 12 Plus*. Analisis yang digunakan adalah Analisis *Word Frequencies Queries*, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Word Frequencies Queries



Sumber: *Output Nvivo 12 Plus*, 2021

Berdasarkan analisis di atas, maka kata yang paling dominan adalah ada, sudah, perilaku, desa, sampah, kotak, program, kumuh, masyarakat, perubahan. Beberapa kata tersebut dianalisis lebih dalam lagi dan dicocokkan dengan jawaban dari wawancara dengan informan, hasil penelusuran dokumentasi serta observasi untuk mendapatkan hasil yang akurat.

1.1 Intervensi yang Berkontribusi pada Perubahan atau Ketiadaan Perubahan Perilaku Masyarakat Pasca Program KOTAKU

Pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana akan secara langsung mempengaruhi perilaku masyarakat. Namun dalam beberapa hal lain pembangunan infrastruktur juga harus dibarengi dengan intervensi untuk mendorong perubahan perilaku hidup masyarakat terutama agar masyarakat bersedia merawat dan memelihara infrastruktur yang telah terbangun. Kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan tugas, kedudukan, dan fungsi OPD serta lembaga peduli. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penelusuran dokumen, kegiatan sosialisasi dan edukasi menjadi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Program KOTAKU, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk mendorong kesadaran masyarakat agar mengubah perilaku hidupnya sehingga mendukung keberlanjutan program.

Intervensi yang dilakukan oleh OPD dan lembaga peduli yang berkontribusi pada perubahan perilaku masyarakat pasca Program KOTAKU adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan sosialisasi mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat kelurahan/desa; 2) Pelatihan dan pemberian edukasi kepada masyarakat terkait perawatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan agar tidak kumuh dan PHBS; 3) Pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan program untuk mendorong masyarakat memiliki rasa handarbeni. Termasuk dalam hal ini adalah Pembentukan kelompok masyarakat yaitu KSM dan KPP; 4) Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat meliputi pelatihan *soft skills* dan *hard skills*; 5) Koordinasi antara DPRKP, DPUPR, Askot Mandiri dan Fasilitator Program KOTAKU, Fasilitator USAID IUWASH PLUS Kabupaten Magelang, kepala desa dan kelompok masyarakat; 6) Kegiatan pemantauan dan monitoring; 7) Rapat rutin

dan pertemuan kepala desa, tokoh dan kelompok masyarakat di Desa Pucungrejo; 8) Pengadaan event “Senam Sehat” dan “Sanitasi Award” dari DPRKP dan DPUPR Kabupaten Magelang.

Berdasarkan penjabaran uraian intervensi hasil temuan yang diperoleh di atas, peneliti kemudian menganalisis intervensi OPD dan pihak lain yang terlibat pada program dan memberikan kontribusi terhadap perubahan atau ketiadaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat pasca Program KOTAKU. Penulis mengkategorikan intervensi tersebut menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal individu/rumah tangga dan faktor eksternal individu/rumah tangga. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel matriks temuan hasil penelitian berikut ini.

Tabel 1.1
Konteks Lingkungan yang Berkontribusi pada Perubahan/Ketiadaan Perubahan Perilaku Masyarakat

Analisis	Faktor Internal	Faktor Eksternal
Konteks lingkungan internal dan eksternal yang berkontribusi pada perubahan/ketiadaan perubahan perilaku masyarakat pasca implementasi Program KOTAKU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta memelihara infrastruktur lingkungan 2. Faktor pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan sosialisasi mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat kelurahan/desa; 2. Pemberian edukasi terkait PHBS dan perawatan serta pemeliharaan infrastruktur lingkungan; 3. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat (pelatihan <i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i>); 4. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan program termasuk pembentukan KSM dan KPP; 5. Pemantauan dan monitoring program; 6. Koordinasi antara DPRKP, DPUPR, koordinator Program

		KOTAKU, fasilitator USAID IUWASH PLUS Kabupaten Magelang, kepala desa dan kelompok masyarakat;
Penjelasan mengapa perubahan perilaku masyarakat dapat terjadi/tidak terjadi pasca program KOTAKU	Karakter dan pola pikir individu menjadi faktor utama yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya perubahan perilaku hidup masyarakat pasca program.	Perubahan perilaku masyarakat dapat terjadi atau tidak terjadi dipengaruhi oleh bantuan pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana dari Program KOTAKU. Selain itu juga intervensi dari pihak eksternal yang berpengaruh dan diterima dengan baik oleh masyarakat kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Sumber: Analisis, 2021

1.2 Jenis Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat

Hasil temuan penelitian melalui penelusuran dokumen, observasi dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat pasca Program KOTAKU di Desa Pucungrejo dan Desa Sokorini yang lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum adanya bantuan program KOTAKU. Di Desa Pucungrejo, masyarakat secara sadar bersedia memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang terbangun dengan baik. Hampir 7 (tujuh) aspek atau indikator permukiman kumuh telah terlaksana dan tercapai di Desa Pucungrejo. Hal tersebut meliputi: (1) pembangunan Rumah Khusus “Pucung Berkah” dalam rangka mengurangi kepadatan bangunan; (2) Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan, warga secara sadar dan sukarela menyumbangkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan; (3) Pembangunan drainase; (4) Pembangunan sarana air bersih yang mendorong pola hidup sehat masyarakat; (5) Pengelolaan persampahan; (6) Pengelolaan air limbah yang layak buang; (7) Pengamanan proteksi kebakaran, warga masyarakat menjadi lebih tanggap atau siaga jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Contoh lain, masyarakat yang sebelumnya

BABS juga beralih menggunakan fasilitas jamban (MCK Umum) dari bantuan Program KOTAKU. Tidak hanya memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang telah terbangun, KPP di Desa Pucungrejo juga berjalan dengan cukup baik. KPP secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas pemeliharaan infrastruktur di lingkungan desa. Masyarakat juga bersedia membayar iuran guna perawatan dan pemeliharaan infrastruktur, hal ini membuktikan bahwa masyarakat setuju akan keberlanjutan lingkungan sehat agar tidak kumuh kembali.

Kemudian terkait pembuangan limbah rumah tangga yang sebelumnya dibuang di saluran selokan yang tidak layak kini sudah beralih ke saluran khusus sesuai standar kelayakan. Terkait pengelolaan sampah juga sangat terlihat perubahannya, sebagian masyarakat tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat. Setiap dusun sudah mempunyai motor viar yang mengangkut sampah rumah tangga ke tempat pengelolaan sampah di desa. Masyarakat juga bersedia membayar iuran untuk pengelolaan sampah tersebut. Bahkan pengelolaan sampah di Desa Pucungrejo juga bekerja sama dengan pemulung untuk memilah sampah mana yang bisa didaur ulang dan memberikan nilai ekonomi.

Sementara itu, perubahan perilaku masyarakat pasca Program KOTAKU di Desa Sokorini juga sudah nampak meskipun belum sebaik yang diharapkan. Masyarakat desa yang belum mempunyai jamban pribadi tetap bersedia memanfaatkan fasilitas MCK yang terbangun, namun dalam pemeliharannya belum terorganisir oleh KPP. Terkait pengelolaan persampahan, di Desa Sokorini sudah dibangun TPS3R, sudah diadakan sarana prasarannya seperti mesin pencacah dan motor sampah namun pengelolaannya tidak berjalan. Pemerintah Desa Sokorini juga sudah beberapa kali mengalokasikan anggaran untuk bak sampah TPS3R tetapi juga belum berhasil dijalankan sesuai harapan. Dalam hal ini berarti pemerintah desa sudah berupaya untuk menangani permasalahan namun belum mendapat respons baik dari masyarakat. Selain itu, diketahui bahwa tidak ada iuran dari masyarakat seperti halnya di Desa Pucungrejo yang digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan infrastruktur MCK Umum dan pengelolaan persampahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat serta pemeliharaan infrastruktur di lingkungan permukiman Desa Sokorini pasca Program KOTAKU belum sepenuhnya berhasil.

Penelitian ini kemudian mengkategorikan jenis perubahan perilaku untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat di Desa Pucungrejo dan Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang pasca implementasi kebijakan Program KOTAKU. Jenis perubahan perilaku tersebut adalah: 1) Perubahan masih

dalam tataran kognitif; 2) Perubahan masih dalam tataran afektif (sikap); dan 3) Perubahan sudah dalam bentuk perilaku. Berikut tabel matriks temuan hasil penelitian mengenai perubahan perilaku masyarakat pasca implementasi Program KOTAKU.

Tabel 1.2
Jenis Perubahan Perilaku Masyarakat Pasca Program KOTAKU

Analisis	Aspek Kognitif	Aspek Afektif	Aspek Perilaku
Desa Pucungrejo			
Jenis perubahan perilaku masyarakat pasca Program KOTAKU	Meningkatnya kesadaran dan pola pikir masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta memelihara infrastruktur lingkungan, seperti dalam hal penggunaan jamban, pembuangan limbah rumah tangga, dan pengelolaan sampah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan masyarakat dalam hal ini pembentukan KPP sebagai kelompok pemeliharaan infrastruktur bangunan, sanitasi dan ipal di desa. KPP juga rutin melakukan pertemuan/rapat setiap bulan bahkan mempunyai rencana kerja. 2. Masyarakat bersedia membayar iuran setiap bulan untuk perawatan infrastruktur dan pengelolaan persampahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beralih dari BABS di sungai ke kesadaran menggunakan fasilitas jamban pribadi dan MCK Umum yang telah terbangun 2. Menggunakan jamban kedap air yang sudah layak teknis 3. Limbah rumah tangga yang dulu dibuang di saluran selokan depan rumah beralih ke saluran khusus instalasi pengolah air limbah, sehingga sudah layak buang 4. Di masing-masing rumah tangga sudah memiliki bak sampah 3R meskipun

			<p>hanya dengan wadah sederhana</p> <p>5. Masyarakat mulai memilah sampah mana yang bisa dikelola untuk didaur ulang dan mana yang tidak bisa dikelola</p> <p>6. Pengelolaan sampah 3R di Desa Pucungrejo bekerja sama dengan pemulung</p> <p>7. Warga secara sadar dan sukarela menyumbangkan sebagian tanah miliknya untuk pembangunan infrastruktur jalan dan drainase</p> <p>8. Dengan adanya pelatihan dan pengadaan APAR, warga masyarakat lebih tanggap dan siaga terhadap bencana kebakaran</p>
--	--	--	---

Desa Sokorini			
Jenis perubahan perilaku masyarakat pasca Program KOTAKU	Meningkatnya pola pikir dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat terkait BABS dan mencuci pakaian dan peralatan dapur	Sebagian masyarakat yang menggunakan MCK Umum bersedia merawat infrastruktur tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebiasaan masyarakat BABS di saluran irigasi berkurang, sebagian masyarakat sudah beralih menggunakan MCK yang dibangun dari Program KOTAKU 2. Sebagian masyarakat secara mandiri rutin membersihkan infrastruktur MCK dari Program KOTAKU

Sumber: Analisis, 2021

1.3 Hambatan Perubahan Perilaku Masyarakat

Setiap individu dalam masyarakat tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sebagian masyarakat mungkin dapat dengan mudah menerima stimulus/dorongan yang diberikan untuk mengubah perilakunya, namun sebagian yang lain belum tentu dapat menerima dengan baik. Permasalahan tersebut yang juga menjadi hambatan dan tantangan dalam rangka mewujudkan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat pasca implementasi Program KOTAKU di lokasi kawasan permukiman kumuh. Karakteristik masyarakat itulah yang menghambat terjadinya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat pasca Program KOTAKU. Selain itu, pemimpin dalam hal ini kepala desa atau tokoh masyarakat juga sangat berpengaruh pada kesiapan dan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku hidupnya. Komitmen kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakatnya menuju perilaku hidup yang bersih dan sehat akan secara langsung mempengaruhi masyarakat untuk tergerak mengubah perilaku hidupnya. Hal ini dikarenakan kepala desa atau tokoh masyarakat menjadi

salah satu aktor penting dalam rangka terwujudnya aspek ketercapaian tujuan program yaitu perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat pasca Program KOTAKU.

Penutup

Konteks lingkungan yang kemudian dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal memberikan pengaruh pada sejauh mana ketercapaian tujuan program yaitu perubahan perilaku masyarakat pasca program. Secara menyeluruh apabila diambil kesimpulan, kegiatan sosialisasi, edukasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pelibatan masyarakat menjadi intervensi yang memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan tujuan perubahan perilaku hidup masyarakat pasca program. Dua kepala desa di kedua lokasi penelitian memiliki perbedaan komitmen dalam mengubah perilaku hidup masyarakatnya. Hal tersebut berakibat pada perbedaan jenis perubahan perilaku hidup masyarakat diantara dua desa pasca implementasi Program KOTAKU. Di Desa Pucungrejo, perubahan perilaku masyarakat sudah tercapai hampir di 7 (tujuh) aspek atau indikator permukiman kumuh yang menjadi sasaran Program KOTAKU. KPP di Desa Pucungrejo juga berjalan dengan baik, rutin melakukan pertemuan yang membahas pemeliharaan infrastruktur bahkan mempunyai rencana kerja. Sebaliknya di Desa Sokorini komitmen kepala desa terhadap perubahan perilaku hidup masyarakat untuk keberlanjutan program masih dipertanyakan, KPP di Desa Sokorini belum mempunyai rencana kerja atau sekadar mengadakan pertemuan rutin. Ketercapaian perubahan perilaku di Desa Sokorini juga belum sepenuhnya maksimal, terdapat beberapa pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana yang masih belum berjalan sehingga sia-sia.

Perubahan perilaku masyarakat memang membutuhkan waktu yang lama karena pola pikir dan kebiasaan masyarakat sulit diubah. Karakteristik individu terhadap lingkungannya itulah yang menghambat terjadinya perubahan perilaku hidup masyarakat. Intervensi sudah dilakukan oleh OPD dan lembaga peduli namun keberlanjutan program akan sulit tercapai apabila tidak ada komitmen kuat dari kepala desa atau tokoh masyarakat yang memotori masyarakat untuk mengubah perilaku hidupnya. Perubahan akan berjalan lambat, infrastruktur tidak terpelihara dengan baik dan keberlanjutan Program KOTAKU tidak bisa terwujud. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Bupati Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang agar bersama-sama menyusun Peraturan Daerah (Perda) Kumuh dan Peraturan Bupati (Perbub) mengenai peningkatan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh perkotaan.
2. Untuk DPRKP Kabupaten Magelang agar membentuk Kelompok Belajar Perkotaan (KBP) yang menjadi forum diskusi antara pemerintah daerah dengan masyarakat mengenai pemeliharaan permukiman agar tidak kumuh.

3. Untuk Bupati atau Kepala BAPPEDA Kabupaten Magelang agar melakukan revitalisasi peran dan fungsi Pokja PKP.
4. Untuk Kepala Desa Pucungrejo dan Sokorini agar menguatkan fungsi dan peran KPP di desa. Hal ini dapat diupayakan dengan membuat sistem insentif bagi KPP yang berhasil mendorong masyarakat mengubah perilaku hidupnya dan memelihara infrastruktur lingkungan.
5. Untuk Kepala Desa Sokorini, agar: (a) Mempunyai komitmen yang kuat untuk mengubah perilaku hidup masyarakat dengan giat mendiseminasikan PHBS dan (b) Mengadakan rapat atau pertemuan rutin dan memiliki *group chat* yang berisi KPP guna memudahkan dalam koordinasi terkait pemeliharaan infrastruktur dan upaya perubahan perilaku hidup masyarakat.
6. Untuk Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) di desa supaya lebih kreatif dalam mengembangkan kegiatan yang produktif untuk mendukung keberlanjutan Program KOTAKU di desa. Misalnya, dengan membudidayakan ikan di sepanjang drainase sehingga akan mempunyai nilai tambah sebagai sumber pembiayaan guna perawatan dan pemeliharaan drainase.

Karena keterbatasan penelitian dan berdasarkan kesimpulan penelitian ini bahwa faktor kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh dalam mengubah perilaku masyarakat, maka saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dapat melakukan penelitian dengan topik faktor kepemimpinan terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat perdesaan.

Referensi

- Das, A. 2015. Participatory Slum Upgrading: Lessons from Post-Decentralization India and Indonesia. *Journal Of Indonesian Regional Development and Environment*, 1, 15-34.
- Grindle, M. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Institute For Government. 2010, January. *MINDSPACE: influencing behavior through public policy*. London: Institue For Government, The Cabinet Office. Diakses pada 22 Februari 2021, jam 11.00 WIB dari: <https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/MINDSPACE.pdf>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. Diakses pada 3 Mei 2020, jam 19.30 WIB dari: <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>.
- Keputusan Bupati Magelang No 188.45/498/KEP/25/ 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Magelang
- Kholid, Ahmad. 2012. *Promosi Kesehatan Dengan pendekatan Teori Perilaku, Media, dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Madiasworo, T. 2017. "Konsep Pencegahan Permukiman Kumuh". *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya dan Pelatihan Pokja PKP

- Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Program KOTAKU, di Jakarta, pada tanggal 10 Oktober. Diakses pada 3 Mei 2020, jam 19.45 WIB dari: http://kotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/PokjaPKP/05_Kasubdit_Standbag_PKP-Konsep_Pencegahan.pdf
- Mazmanian, D. A., Sabatier, P. A. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foreman and Company.
- Michie, S., Stralen, M. M., West, R. 2011. The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. *Implementation Science*, 6 (1), 42. <http://www.implementationscience.com/content/6/1/42>
- Michie, S., West, R. 2013. Behaviour Change Theory and Evidence: a presentation to Government. *Health Psychology Review*, 7 (1), 1-22. <http://dx.doi.org/10.1080/17437199.2011.649445>
- Notoatmodjo, S. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Nurhasanah. 2019. Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 58-70. DOI: 10.33474/jisop
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
- Sahroni. (2019). Pembelajaran Masyarakat Berbasis Masalah sebagai Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU. *Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, 4 (2), 143-158.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh
- Tummers, L. 2019. Public Policy and Behavior Change. *Public Administration Review*, 79 (6), 925-930. <https://doi.org/10.1111/puar.13109>
- Tunis, S. R., Benner, J., McClellan, M. 2010. Comparative Effectiveness research: Policy Context, Methods Development and Research Infrastructure. *Statistics in Medicine*. DOI: 10.1002/sim.3818
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman USAID. 2018, Desember 20. Bappeda & Ligbangda Kabupaten Magelang Menggelar Lokakarya Strategi Advokasi dan Inovasi Layanan Lumpur Tinja Berkelanjutan. Diakses pada 10 April 2021, jam 14.15 WIB dari: <https://www.iuwashplus.or.id/arsip/3700>
- Yoga, C. 2019, Oktober 27. Warga Muntilan Dan Mertoyudan Menandatangani Komitmen Bebas Kumuh. Diakses pada 23 Juni 2020, jam 14.20 WIB dari <http://www.beritamagelang.id/bebas-kumuh-program-kotaku>.